

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah																								
IK : Nilai Reformasi Birokrasi																								
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah						Meningkatnya kualitas manajemen ASN						Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik										Meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa		
IK : Nilai SAKIP (crosscutting Bappeda)						IK : Indeks Sistem Merit , (crosscutting BKPSDM)						IK : Indeks Pelayanan Publik										IK : Indeks Tata Kelola Pengadaan		
Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja				Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Kinerja	Terlaksananya penempatan ASN sesuai dengan Kebutuhan	Meningkatnya Kualitas Manajemen Talenta ASN	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja ASN	Meningkatnya Kompetensi ASN	Menurunnya potensi penyimpangan penyelenggaraan pelayanan publik				Meningkatnya kualitas kebijakan daerah			Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat			meningkatnya kualtas perencanaan pengadaan barang/jasa	Meningkatnya kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengelolaan pengadaan			
IK : Nilai Pelaporan Kinerja			IK : Nilai LPPD	IK : Nilai Perencanaan dan Pengukuran Kinerja (crosscutting Bappeda)	IK : Nilai Komponen Evaluasi AKIP Internal KemenpanRB (crosscutting Inspektorat)	IK : Persentase kesesuaian penempatan ASN dengan kebutuhan (crosscutting BKPSDM)	IK : Tingkat Penerapan Manajemen Talenta ASN (crosscutting BKPSDM)	IK : Persentase ASN dengan Penilaian Kinerja Minimal Baik (crosscutting BKPSDM)	IK : Persentase ASN yang Memperoleh Hak Pengembangan Kompetensi Minimal 20 JP (crosscutting BKPSDM)	IK : Nilai MalAdministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik				IK : 1. Indeks Kualitas Kebijakan 2. Indeks Reformasi Hukum			IK : indeks kepuasan masyarakat			IK : Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan dalam SIRUP	IK : persentase PPK yang memiliki sertifikat minimal tipe c			
meningkatnya kesesuaian LKJIP dengan Permenpan 53 tahun 2014		Meningkatnya efektifitas penggunaan sumber daya (APBD)	meningkatnya kesesuaian LPPD dengan pedoman penyusunan LPPD			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kebutuhan ASN	Meningkatnya kualitas evaluasi jabatan ASN			Meningkatnya kualitas standar pelayanan publik sesuai pedoman pada permenpan 15 tahun 2014				Meningkatnya transparansi informasi penyelenggaran layanan publik.	Meningkatnya pengawasan dan perbaikan atas penyelenggaran layanan publik.	Meningkatnya Komitmen Perangkat Daerah dalam Penanganan Pengaduan	terlaksananya Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi	terlaksananya keberlanjutan kebijakan	Meningkatnya transparansi informasi kebijakan	meningkatnya ketepatan waktu layanan	Meningkatnya transparansi informasi persyaratan penyelenggaran layanan publik.	Meningkatnya Komitmen Perangkat Daerah dalam Penanganan Pengaduan	Tersedianya dokumen rencana umum pengadaan perangkat daerah yang telah	terlaksananya pelatihan pembuat komitmen
IK : persentase OPD yang menyusun LKJIP dengan Permenpan 53 tahun 2014		IK : persentase perangkat daerah dengan Capaian kinerja APBD minimal 80%	IK : persentase data dukung IKK yang sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD			IK : Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen Anjab, ABK, dan Peta Jabatan yang valid dan mutakhir	IK : Persentase jabatan ASN yang dievaluasi sesuai standar (anjab abk)			IK : Persentase unit layanan yang memenuhi komponen standar pelayanan sesuai pedoman pada permenpan 15 tahun 2014				IK : Persentase standar pelayanan yang dipublikasi pada SIPPN	IK : Persentase unit layanan dengan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik minimal 4	IK : Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti (crosscutting Kominfo)	IK : jumlah perda dan perpup yang dilakukan harmonisasi	IK : Persentase perda yang ditindaklanjui dengan perpup	IK : persentase kebijakan yang di publikasi melalui JDIH Gresik	IK : persentase UP dengan nilai unsur ketepatan waktu layanan minimal 3.5	IK : Persentase persyaratan layanan yang dipublikasikan	IK : Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti (crosscutting Kominfo)	IK : Jumlah dokumen RUP yang telah diverifikasi.	IK : jumlah PPK yang mengikuti pelatihan pengadaan barang jasa (crosscutting BKPSDM)
Tersusunnya Laporan kinerja OPD tepat waktu		Meningkatnya kompetensi SDM Perangkat Daerah dalam Pelaporan Kinerja	Meningkatnya kesesuaian penyerapan APBD dengan Time schedule / Rencana anggaran kas	meningkatnya kualitas data dukung IKK		Pendampingan Penyusunan Anjab dan verifikasi perhitungan beban kerja	verifikasi perhitungan beban kerja	Meningkatnya kompetensi SDM yang melakukan evaluasi Jabatan ASN		terlaksananya reviu standar pelayanan				melaksanakan update standar pelayanan pada SIPPN	terlaksananya evaluasi data dukung PEKPPP		terlaksananya public hearing	terlaksananya tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan	terlaksananya dokumentasi produk hukum,	meningkatnya kompetensi SDM petugas layanan	meningkatnya kualitas SOP	Terlaksananya rekonsialiasi penatausahaa n barang milik daerah	Terlaksananya penginputan dan pemutakhiran data RUP pada aplikasi SIRUP.	
IK : Jumlah OPD yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu		IK : Persentase peserta pelatihan penyusunan pelaporan kinerja yang hasil pre test dan post testnya mengalami peningkatan	IK : Persentase Perangkat daerah dengan penyerapan APBD sesuai RAK	IK : persentasi data dukung IKK yang terverifikasi		IK : Jumlah OPD yang didampingi dalam penyusunan Anjab	IK : Jumlah OPD yang diverifikasi perhitungan beban kerja	IK : jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya (crosscutting BKPSDM)		IK : Persentase UP yang melakukan reviu SP				IK : jumlah UP yang melakukan Update standar pelayanan pada SIPPN	IK : persentase UP yang dievaluasi data dukungnya		IK : jumlah kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat	IK : persentase hasil evaluasi kebijakan yang ditindaklanjuti	IK : persentase produk hukum yang di dokumentasikan	IK : Jumlah petugas layanan yang mengikuti pelatihan (crosscutting BKPSDM)	IK : Jumlah SOP yang di evaluasi	IK : jumlah rekonsialiasi penatausahaa n barang milik daerah	IK : Jumlah Perangkat daerah yang memperbarui paket pengadaan pada SIRUP.	
Terlaksananya Verifikasi LKJIP		Terlaksananya Reviu LKJIP		terlaksananya Bimtek penyusunan laporan kinerja	terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi penyerapan anggaran secara berkala	terlaksananya pendampingan dan pemenuhan data dukung IKK	Tersedianya anjab	Tersedianya analisis beban kerja		terlaksananya sosialisasi penyusunan standar pelayanan				terlaksananya verifikasi standar pelayanan	terlaksananya fasilitasi pendaftaran akun SIPPN	terlaksananya sosialisasi PEKPPP	terlaksananya fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	terlaksananya evaluasi kebijakan berbasis bukti (evidence based)	terlaksananya digitalisasi produk hukum		Tersedianya SOP	tersusunnya Penatausahaa n Barang Milik Daerah		
IK : Jumlah LKJIP yang telah di verifikasi	IK : Jumlah LKJIP yang telah di reviu	IK : Jumlah perangkat daerah yang memenuhi tindak lanjut hasil reviu (crosscutting Bappeda)	IK : jumlah ASN yang mengikuti Bimtek penyusunan laporan kinerja	IK : jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi penyerapan anggaran secara berkala	IK : jumlah Perangkat daerah yang didampingi dalam pemenuhan data dukung IKK	IK : Jumlah Perbup anjab yang disusun	IK : Jumlah Perbup analisis beban kerja yang disusun			IK : jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi standar pelayanan	IK : jumlah standar pelayanan yang diverifikasi	IK : Jumlah UP yang memiliki akun SIPPN	IK : Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PEKPPP	IK : Jumlah Produk Hukum Yang Difasilitasi	IK : Jumlah kebijakan yang dievaluasi	IK : Jumlah produk hukum yang terdigitalisasi		IK : Jumlah PD yang memiliki SOP	IK : Jumlah Dokumen Penatausahaa n barang milik daerah					